

Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Putri Minang Sary^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: putriminangsary@gmail.com

Tanggal Masuk:

07 Maret 2024

Tanggal Revisi:

13 Desember 2025

Tanggal Diterima:

18 Juli 2026

Keywords: *Regional Government; Administration; Regional Wealth; Capital Expenditure; and Level of Regional Independence.*

How to cite (APA 6th style)

Sary, P. M., & Sari, V. F. (2026). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (3), 1020-1032.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i3.640>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of regional wealth, capital expenditure and the level of regional independence on the performance of district/city government administration in West Sumatra Province. The analytical tool used is moderate regression analysis. The research results show that regional wealth has no effect on the performance of regional government administration. Capital expenditure has a negative influence on the performance of regional government administration. The level of regional independence has a positive effect on the performance of regional government administration.

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah harus menyerahkan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) dibuat pemerintah daerah lalu diserahkan ke pemerintah pusaat sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan didalam LPPD termuat informasi penyelenggaraan pemerintah yang disajikan secara akurat dan memadai. Sumber informasi yang digunakan dalam LPPD yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan LPPD penting sebab dalam LPPD terdapat pencapaian

kinerja pemerintah daerah dan juga pelaksanaan tugas pembantuan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.. Pemerintah pusat melaksanakan evaluasi guna keperluan pembinaan terhadap daerah menjadikan LPPD sebagai acuan utamanya (Usman & Misra, 2019).

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) berguna untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya maka dilakukan. Setelah dilakukan evaluasi, nantinya pemerintah pusat akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi berupa program pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. EKPPD dapat didefinisikan sebagai proses penilaian data yang digunakan secara sistematis terhadap kinerja pemerintah.

Sumatera Barat mengalami penurunan skor EKPPD yang cukup signifikan yaitu dari status sangat tinggi pada 2016 menjadi status tinggi pada 2017 dengan penurunan skor dari 3,07 menjadi 2,85. Dari 19 kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Barat hanya 5 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kinerja yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan sedangkan yang lainnya mengalami penurunan kinerja yang sangat signifikan. Penurunan status kinerja disebabkan karena 8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengalami penurunan yang diantaranya yaitu Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM), jumlah ekspor, serapan APBD dan seterusnya. Selain disebabkan karena faktor penurunan IKK, data agregasi dari setiap kabupaten/kota di Sumatera juga menjadi faktor pemicu penurunan skor kinerja (Dani, 2019).

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana publik. Pemanfaatan kekayaan daerah dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana tersebut. Kekayaan daerah dapat dikatakan sebagai kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri urusan operasional pemerintahannya tanpa melibatkan bantuan dari pemerintah pusat. Total aset salah satu cara mengukur kekayaan daerah yang dimiliki daerah tersebut (Armaja, Ibrahim & Aliamin, 2015).

Salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah aset. Aset sebagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang pada masa depan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi serta dapat diukur dengan satuan uang yang jelas, termasuk juga sumberdaya lain memiliki nilai sejarah dan budaya berdasarkan PP 71 tahun 2010.

Belanja modal di gunakan menunjang pelayanan publik berupa belanja aset tetap yang menambah infrastruktur diperlukan (Sari & Mustanda, 2019). Menurut PP 71 Tahun 2010 belanja modal adalah semua pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Belanja modal dipergunakan pemerintah untuk menambah berbagai aset tetap yang dimiliki berupa mesin dan aset tetap lainnya yang diperlukan (Harumiati & Payatma, 2014).

Belanja modal diharapkan mampu untuk menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu agar tujuan tersebut tercapai pengalokasian belanja modal harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga tujuan dari penlokasian belanja modal tersebut dapat tercapai.

Salah satu cara untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah adalah dengan melihat jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan suatu daerah untuk mengelola secara optimal sumber pendapatn daerah dapat meningkatkan realisasi PAD yang dapat untuk menunjang kinerja pemerintah menjadi lebih baik (Sari & Mustanda, 2019). Sehingga semakin besar PAD yang dihasilkan suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ara, Herwanti & Putuningsih (2016), Aminah, Afiah & Pratama (2019), Harumiati & Payatma (2014), Qowi & Prabowo (2017) memperoleh hasil

kekayaan daerah beserta belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Artha, Basuki & Alamsyah (2015) serta Prastiwi & Aji (2020) juga melakukan penelitian tentang variabel dengan hasil kekayaan daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kekayaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal serta belanja modal yang belum sepenuhnya di alokasikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bisa menjadi penyebab tidak berpengaruhnya belanja modal dan kekayaan daerah.

Karena perbedaan karakteristik setiap wilayah yang terdapat di Indonesia penelitian dan belum memperoleh hasil yang konsisten, oleh karena itu peneliti ingin meneliti tertarik untuk meneliti kembali. Selain itu peneliti terdahulu belum mempertimbangkan faktor tingkat kemandirian daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

PAD yang dihasilkan suatu daerah akan menggambarkan besarnya sumber dana yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam peningkatan kinerja. bertambahnya PAD yang dihasilkan suatu daerah maka pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan akan lebih banyak menggunakan PAD, yang berarti tingkat kemandirian yang semakin tinggi meningkatkan kinerja serta pembangunan yang ada di daerah. peneliti menilai bahwa tingkat kemandirian daerah dapat memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. memanfaatkan PAD sendiri tanpa menggunakan dana transfer dari pemerintah serta dapat mendukung hasil pembangunan yang telah dilakukan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja kinerja dari pemerintah daerah (Machfud, Asnawi & Naz'aina, 2020).

penelitian ini diharapkan dapat jadi acuan bagi pihak berkepentinaan dalam pengambilan keputusan yang dapat menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya penelitian untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat kemandirian daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdapat di kabupaten/kota di provinsi Sumatera.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Agency Theory

Hubungan antara dua belah pihak atau lebih, hal ini terjadi ketika salah satu pihak bertindak memberikan dampak kepada pihak lain merupakan definisi dari teori agensi. Hubungan antara pihak agen dan principal memiliki kecenderungan dimana masing – masing pihak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan masing – masing yang nantinya akan memicu terjadi asimetri informasi (Jensen dan Meckling,1976). Jika dilihat dalam sektor publik teori keagenan dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat, disini masyarakat yang berperan sebagai prinsipal memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Pemerintah yang bertindak sebagai agen berkewajiban untuk mengelola sumber daya dengan semestinya, sehingga menghasilkan hasil yang optimal dan memadai yang dapat meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga mendorong peningkatan kinerja.

Signalling Teori

Dalam signalling theory pihak pengirim memberikan suatu sinyal yang bermanfaat kepada bagi pihak penerima berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan (Spence,1973). Jika dilihat dalam bidang pemerintahan, dapat terlihat dari hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dimana pemerintah berusaha memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat terus mendukung pemerintahan yang berjalan. Tujuan pemerintah daerah memberikan informasi kinerja pengelolaan pemerintah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban publik sekaligus sebagai sarana memberi sinyal yang baik kepada masyarakat tentang pemerintahan yang berjalan(Artha, Prayitno & Alamsyah,2015).

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tim khusus dari pemerintah pusat akan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kepada laporan kinerja yang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hasil kinerja dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan terkait tugas pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan. Tujuan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah menilai apakah penyelenggaraan pemerintah telah dijalankan dengan baik.

Kekayaan Daerah

Sumber daya yang dapat memberikan pelayanan kepada publik serta dapat dinilai dari total aset yang dimiliki suatu daerah disebut kekayaan daerah (Usman & Misra, 2019). Kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dapat mencerminkan kekayaan daerah yang dimilikinya (Aminah, Afiah & pratama, 2019). Usman & Misra, 2019 menjelaskan dalam pengukuran kekayaan daerah yang dimiliki suatu daerah juga bisa dilakukan dengan melihat total aset yang dimiliki daerah tersebut, total aset yang dimiliki pemerintah diharapkan mampu menunjang dalam kegiatan operasional pemerintah.

Belanja Modal

Pengertian Belanja modal yaitu belanja pemerintah yang menambah aset dan akan menimbulkan kewajiban yang bersifat rutin, memberikan manfaat lebih dari satu periode (Andrifa, et al, 2016). Penggunaan belanja modal untuk menganggarkan pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal juga bisa menjadi sarana meningkatkan pendapatan (Antari dan Sedana, 2018).

Tingkat Kemandirian Daerah

Machfud & Asnawi (2021) menjelaskan apabila PAD yang dihasilkan daerah lebih tinggi dari dana transfer pemerintah maka dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Apabila dalam proses pembangunan lebih banyak menggunakan dana yang bersumber dari PAD maka dapat dikatakan daerah tersebut mandiri (Matilde dan Dian, 2020). Pajak serta retribusi lainnya yang sah yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah merupakan contoh dari PAD.

PAD digunakan sebagai pengukur tingkat kemandirian daerah. Karena potensi pendapatan yang diperoleh pemerintah tanpa bantuan pemerintah pusat berasal dari PAD. Semakin tinggi PAD yang suatu wilayah akan mampu untuk menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan dan memberikan pelayanan publik disebut kekayaan daerah. Dalam penelitian ini total aset digunakan untuk menilai kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah. Aset dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang diharapkan bisa untuk memberikan manfaat dimasa depan, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk juga sumber daya nonkeuangan yang disediakan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta sumber daya yang dipelihara dengan tujuan untuk melindungi sejarah serta budaya. Kekayaan daerah dan kinerja pemerintah memiliki hubungan berbanding lurus.

Hasil penelitian tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan Qowi dan Prabowo (2017), Ara,

Herwanti & Putuningsih (2016), Sudarsana dan Rahadjo (2013), Mutikarini dan Fitriasari (2011), Harumiati dan Payatma (2014). Maka hipotesis pertama penelitian:

H₁: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Belanja modal memiliki hubungan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari alokasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan untuk menambah aset tetap yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Penelitian Qowi dan Prabowo (2017), Usman dan Misra (2019), Ara, Herwanti & Putuningsih (2016), Harumiati dan Payamta (2014), menunjukkan hasil bahwa belanja modal memiliki berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah. Yang memiliki arti bahwa pengalokasian belanja modal dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pengembangan sarana dan prasarana publik. Maka hipotesis 2 penelitian ini :

H₂: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya disebut dengan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar jumlah PAD yang dihasilkan suatu daerah maka semakin besar pula dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah dan Putri (2015), Antari dan Sedana (2018), Saraswati (2019) menunjukkan hasil bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Yang berarti semakin besar PAD yang dihasilkan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Jenis Penelitian

Kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat menjadi populasi dalam penelitian. Jenis penelitian yaitu kausalitas yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2016) mendefinisikan bahwa penelitian kausalitas merupakan penelitian mengenai sebab akibat antara 2 variabel atau lebih sehingga bisa melihat pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pengambilan sampel dengan metode total sampling.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (<https://padang.bpk.go.id>) dan situs resmi Direktorat Jendral Otonomi Daerah (<https://otda.kemendagri.go.id>). Data sekunder yang digunakan berupa neraca dan laporan realisasi anggaran beserta data skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota Sumatera Barat.

VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURAN

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukur kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan melihat skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki range nilai 0-4 berdasarkan LPPD tahun 2014-2018. Hasil kinerja dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya, yang dapat diukur serta sesuai dengan tanggung jawab serta kewenangan yang dimilikinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan disebut dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kekayaan Daerah

Logaritma natural (Ln) Total aset digunakan untuk menilai kekayaan daerah karena besarnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh suatu daerah dilihat dari total aset. Tujuan penggunaan agar logaritma natural (Ln) agar menyerhanakan nilai total aset. Rumus pengukuran kekayaan daerah:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menambah aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja merupakan cara mengukur belanja modal yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya untuk melihat belanja daerah yang digunakan untuk belanja modal. Berikut rumus dalam mengukur belanja modal:

$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}$

Tingkat Kemandirian Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan setiap kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat digunakan untuk melihat tingkat kemandirian daerah dalam penelitian ini. Tingkat kemandirian daerah yang dilihat dari total PAD dinilai akan mampu memperkuat kinerja penyelenggaraan pemerintah. Rumus yang digunakan dalam mengukur variable tingkat kemandirian daerah adalah :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}}$$

Metode Analisis Data

Program SPSS 22 dipilih untuk melakukan pengujian data pada penelitian, dengan model regresi linier berganda metode moderate regression analysis, dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1KD + \beta_2BM + \beta_3TK + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Analisa Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	79	2.58	3.41	3.0300	.15438
Kekayaan Daerah	79	27.43	28.73	28.0080	.28817
Belanja Modal	79	.12	.35	.2200	.05494
Tingkat Kemandirian Daerah	79	.04	.16	.0876	.02969
Valid N (listwise)	79				

Hasil uji statistik deskriptif kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh hasil standar deviasi 0,15438, nilai rata-rata 3.0300, nilai maksimum 3,41 nilai minimum 2,58. kekayaan daerah memperoleh hasil standar deviasi 0,28817, nilai rata-rata 28.0080, nilai maksimum 28,73 seta nilai minimum 27,43. hasil uji belanja modal standar deviasi 0,05494, nilai maksimum 0,35, nilai rata-rata 0,2200 dan nilai minimum 0,12. Hasil uji tingkat kemandirian daerah standar deviasi 0,02969, nilai minimum 0,04, nilai rata-rata 0,0876, nilai maksimum 0,16.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test

		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.14547936
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.044
	Negative	-.052
Test Statistic		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi 0.200 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolonioritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolineoritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kekayaan Daerah	.988	1.012
Belanja Modal	.996	1.004
Tingkat Kemandirian Daerah	.988	1.012

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena nilai tolerance besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10.

Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.335 ^a	.112	.076	.14836	1.963

a. Predictors: (Constant), Kekayaan Daerah , Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Model yang digunakan bebas dari autokorelasi karena telah memenuhi syarat nilai DW berada diantara dU dan 4-dU. Nilai DW adalah 1.963 lebih besar dari nilai dU 1.7141 dengan hasil 4-dU 2,2859

Uji Heterokodesititas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedetisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.021	.012		1.689	.095
Kekayaan Daerah	-.027	.025	-.129	-1.085	.281
Belanja Modal	-.019	.010	-.222	-1.925	.058
Tingkat Kemandirian Daerah	.005	.018	.030	.255	.799

a. Dependent Variable: ABRESID

Tidak terdapat gejala heteroskedasitas dalam model regresi, karena nilai signifikasi kekayaan daerah $0,281 > 0,05$, nilai signifikasi belanja modal $0,058 > 0,05$, dan nilai signifikasi tingkat kemandirian daerah $0,799 > 0,05$.

Uji Kelayakan Model

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.335 ^a	.112	.076	.14836

a. Predictors: (Constant), Kekayaan Daerah, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian R-Square(R²) didapatkan nilai 0,076 atau 7,6% yang artinya variable dependen kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dijelaskan secara signifikan oleh variable independen kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat kemandirian daerah sebesar 7,6% sedangkan sisanya 92,4% dijelaskan variable lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Tabel 7
Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.208	3	.069	3.153	.030 ^b
	Residual	1.651	75	.022		
	Total	1.859	78			

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Kekayaan Daerah, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Daerah

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F yaitu 0,030. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat kemandirian daerah secara bersama – sama terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Uji Hipotesis

Tabel 8
Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2.008	1.652			1.215	.228
Kekayaan Daerah	.037	.059	.069		.633	.529
Belanja Modal	-.611	.306	-.218		-1.996	.050
Tingkat Kemandirian	1.349	.569	.259		2.370	.020

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dari hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) diatas diketahui bahwa variabel independen kekayaan daerah memiliki nilai t hitung 0,633 dengan tingkat signifikansi

0,529 lebih besar dari 0,05 artinya hipotesis 1 ditolak, dengan kata lain kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Variabel independen belanja modal memiliki nilai t hitung -1,996 dengan nilai t tabel 1,990 dengan nilai signifikansi 0,05 artinya hipotesis 2 ditolak karena belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Variabel independen terakhir tingkat kemandirian daerah memiliki nilai t hitung 2,370 besar dari t tabel 1,990 dengan tingkat signifikansi 0,20 yang berarti kecil dari 0,05, artinya hipotesis 3 diterima karena tingkat kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hipotesis pertama (H1) yang ditolak. Karena tidak terdapat pengaruh signifikan kekayaan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori keagenan, apabila pemerintah daerah dalam menjalankan wewenangnya mengelola sumber daya yang dimiliki daerah berjalan baik dapat dikatakan pemerintah daerah berhasil menjalankan perannya sebagai agen dari pemerintah pusat. Jumlah kekayaan daerah, tidak dapat menjadi jaminan daerah memiliki kinerja penyelenggaraan yang optimal. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan meningkat apabila pemerintah mampu mengelola aset dengan baik. Sebagai agen pemerintah harus mampu meningkatkan kinerjanya. Hipotesis 1 ditolak dapat disebabkan karena pemerintah daerah yang bertindak selaku agen belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2013), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Harumiati dan Payamta (2015), Usman dan Misra (2019), Putri dan Sari (2020) memiliki hasil yang sama bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hipotesis kedua (H2) yang ditolak karena berdasarkan uji statistik t belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Besarnya belanja tidak dapat menjamin daerah tersebut memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurunkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini bisa saja disebabkan karena pengelolaan belanja modal belum optimal. Jika dilihat dari sisi teori keagenan, pemerintah daerah berpeluang melakukan *moral hazard* untuk memaksimalkan *utility-nya* sendiri, karena pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk menyusun sendiri anggaran belanja modalnya. Dalam proses penganggaran memungkinkan untuk terjadinya *budgetary slack*, suatu kondisi dimana jumlah belanja modal yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak mencerminkan kapasitas dari belanja modal yang sebenarnya.

Penelitian Qowi dan Prabowo (2017), Harumiati dan Payamta (2015), Mustikarani dan Fitriyani (2011) dan Putri dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kemandirian daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (H3) diterima, karena berdasarkan uji statistik t tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Semakin mandiri suatu daerah maka akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, karena semakin mandiri suatu daerah pemerintah mampu memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga kinerja penyelenggarannya meningkat. Tingkat kemandirian yang diukur dengan PAD menunjukkan hasil bahwa semakin besar PAD yang dihasilkan daerah maka akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat kemandirian daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 – 2018. Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, belanja modal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan tingkat kemandirian daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Telah dilakukan dengan baik penelitian ini, tetapi dalam penelitian masih ada beberapa kekurangan, yaitu:

1. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian hanya dari 2014-2018 pada kabupaten/kota di Sumatera Barat, sehingga menyebabkan hasil penelitian akan memiliki perbedaan apabila dilakukan pada daerah lain, dengan pertimbangan setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik masing – masing.
2. Penelitian hanya terbatas menggunakan data sekunder saja

Saran

Berdasarkan pembahasan beserta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya peneliti akan mengajukan beberapa saran, diharapkan bagi pemerintah lebih memperhatikan faktor yang meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih mengutamakan penggunaan PAD untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. bagi peneliti selanjutnya, dapat dapat menambah rentang waktu penelitian serta sumber data yang digunakan, serta menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh size, wealth, intergovernmental revenue dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2).
- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2.
- Armaja, R. Ibrahim & Aliamin (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).
- Artha, R. D., Basuki, P., & Alamsyah, M. T. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi NTB). *InFestasi*, 11(2).

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Ara, S. C., Herwanti, T. & Putuningsih, E., 2016. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *Journal Of Accounting, Finance and Forensic Accounting*, 4(1).
- Ariwibowo, T. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11.
- Brigham, A. F. & Houston, J. F., 1999. *Manajemen Keuangan*. 8 penyunt. Jakarta: Erlangga.
- Dani, 2019. *EKPPD Sumbar 2018 Turun Peringkat*, s.l.: HarianHaluan.com.
- Ghozali, I., 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2011. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2).
- Jensen , M. C. & Meckling, W. H., 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4).
- Machfud, M., & Asnawi, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1).
- Mustikarani, W. A. & Fitriasari, D., 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indoneisa Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putri, M. S., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(3).
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89-105.
- Saputra, Y., & Ariani, N. E. (2018). Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian Dan Opini Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4).
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8).

- Sari, M. A. O. D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1).
- Sudarsana, H. S. & Rahardjo, S. N., 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indoneisa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4).
- Sedyaningsih, P., & Zaky, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009–2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Usman, R., Misra, F., & Firdaus, F. (2019). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah: Pengujian Legislative Power Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2).
- Qowi, R. & Prabowo, T. J. W., 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1).